

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bank berperan sebagai sarana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dalam sistem operasional perbankan, bidang perkreditan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting mengingat kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi bank.

Dalam menjalankan kegiatannya, bank di dasarkan atas prinsip kepercayaan (*agent of trust*). Bank akan memberikan kredit kepada masyarakat, jika bank mempunyai keyakinan bahwa calon debitur atau penerima kredit mampu dan mau mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga untuk meperoleh kepercayaan tersebut, Sebelum memberikan kredit, bank akan melakukan penilaian yang seksama terhadap calon penerima kredit yang lebih dikenal dengan 5C yaitu penilaian terhadap karakter penerima kredit (*character*), kemampuan penerima kredit (*capacity*), modal

(*capital*), agunan kredit (*collateral*), dan kondisi perekonomian (*condition of economy*).

Kredit merupakan kegiatan dan jasa bank yang penuh dengan risiko yang cukup rumit maka dari itu, bank harus memiliki suatu sistem pengendalian dalam proses penyaluran kredit. Menurut Mulyadi:

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi metode dan ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.¹

Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dan terhindar dari praktek penyaluran kredit yang tidak sehat.

Sistem

pengendalian intern dibidang perkreditan harus mencakup prinsip pengawasan ganda yang diterapkan pada setiap proses pemberian kredit terutama yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bank. Pengendalian intern juga mencakup perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan perkreditan harus

¹ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi keempat, Cetakan Kedua: Selemba Empat, Jakarta, 2016, hal.129.

memadai, dan adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada direksi atau pejabat yang berwenang.

Pengendalian intern yang telah disusun harus ditaati dan dilaksanakan. Untuk menjamin bahwa pengendalian intern telah dilaksanakan dengan efektif, perlu dilakukan suatu penilaian terhadap pengendalian intern. Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan adanya keamanan bank dalam pemberian kredit. Pemberian kredit yang aman akan memberikan dampak positif bagi bank, sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya bergerak dalam bidang perkreditan, maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) menawarkan dua jenis jasa kredit berdasarkan tujuannya yaitu kredit konsumen dan kredit komersil. Dimana kredit konsumen (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif, yang terdiri dari; pinjaman bangunan, pinjaman khusus dan pinjaman ringan. Sedangkan Kredit komersil (*commercial loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan, yang terdiri dari; pinjaman usaha dan pinjaman usaha mikro kecil dan menengah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas dan fokus tentang kredit konsumen yang terdapat pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Medan.

Dalam hal perkreditan tersebut terdapat masalah yang dialami PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Medan yaitu kredit macet dimana kredit bermasalah ini digolongkan menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Sehingga perlu menetapkan sistem pengendalian intern yang tepat, yang bersifat efisien dan efektif dalam pemberian kredit.

Adapun data mengenai jumlah pemberian kredit konsumen dan persentase kredit yang bermasalah (NPL) pada PT. BTN Kantor Cabang Medan periode 2020 dan 2021, tertera pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1

**Data Jumlah Pemberian Kredit Consumer
PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan
Tahun 2020 dan 2021**

KETERANGAN	Jumlah Kredit yang diberikan Tahun 2020 (dalam satuan rupiah)	Jumlah Kredit yang diberikan Tahun 2021 (dalam satuan rupiah)
Kredit lancar	4.500.000.000.000	4.275.000.000.000
Kredit DPK	248.200.000.000	408.000.000.000
Kredit kurang lancar	3.400.000.000	3.055.000.000
Kredit diragukan	6.100.000.000	3.072.000.000
Kredit macet	132.800.000.000	151.044.000.000
Total kredit	4.890.500.000.000	4.840.171.000.000

Sumber: PT. BTN Kantor Cabang Medan 2022.

Dari tabel 1.1 dapat diketahui pada tahun 2020 total kredit yang diberikan kepada para debitur kredit konsumen sebesar Rp. 4.890.500.000.000, dari jumlah pemberian kredit tersebut terdapat kredit DPK (dalam perhatian khusus) sebesar Rp. 248.200.000.000 dengan rasio sebesar 5% dari jumlah kredit yang diberikan dan terdapat non performing loan (kredit yang menunggak melebihi 90 hari) yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet ($3.400.000.000 + 6.100.000.000 + 132.800.000.000$) = sebesar Rp. 142.300.000.000 dengan rasio non performing loan sebesar 2,9%. Sedangkan pada tahun 2021 total kredit yang diberikan kepada para debitur kredit konsumen sebesar Rp. 4.840.171.000.000, dari jumlah pemberian kredit tersebut terdapat kredit DPK (dalam perhatian khusus) sebesar Rp. 408.000.000.000 dengan rasio sebesar 8,42% dari jumlah kredit yang diberikan dan terdapat non performing loan (kredit yang menunggak melebihi 90 hari) yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet ($3.055.000.000 + 3.072.000.000 + 151.044.000.000$) = sebesar Rp.157.171.000.000 dengan rasio non performing loan sebesar 3.25%.

Berdasarkan persentase kredit DPK dan kredit bermasalah (non performing loan) pada PT. BTN Kantor Cabang Medan terdapat kenaikan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI), bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila rasio kredit bermasalah (non performing loan) secara neto lebih dari 5%. Dalam hal tersebut rasio NPL pada PT. BTN Kantor Cabang Medan masih dibawah 5%, yang artinya kredit bermasalah

masih baik dan stabil. Meskipun demikian, hal tersebut perlu diteliti mengingat adanya kenaikan rasio NPL dari tahun sebelumnya. Dan apabila NPL terus mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, maka akan membahayakan kelangsungan usaha bank. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah Pengendalian Intern dalam pemberian kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan telah dilaksanakan secara efektif?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan.
2. Untuk menilai efektivitas pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi PT. BTN kantor cabang Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak bank tentang pengendalian intern pemberian kredit yang efektif yang terdapat pada PT. BTN Kantor cabang Medan.

2. Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai perbankan, khususnya mengenai sistem pemberian kredit. Diharapkan pula dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi pustaka pada perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik mengenai pengendalian intern dan sistem pemberian kredit.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan panduan dalam melanjutkan penelitian ini dimasa yang akan datang khususnya penelitian mengenai pengendalian intern dan sistem pemberian kredit.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Kredit

2.1.1. Pengertian Kredit

Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seorang memperoleh kredit berarti seseorang tersebut memperoleh kepercayaan. Suatu pemberian kredit terjadi apabila didalamnya terkandung kepercayaan orang lain atau badan yang memberikan, kepada orang lain atau badan yang telah diberikan kredit harus memenuhi segala kewajiban pada waktu yang telah ditentukan. Orang atau badan yang memberikan kredit disebut kreditur, sedangkan orang atau badan yang menerima kredit disebut debitur.

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998:

“Pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”²

² UU. No. 10 tahun 1998 tentang **Perbankan**, pasal 1.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan:

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu usaha pemberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.1.2. Unsur-Unsur Pemberian Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud dan arti tertentu, atau dengan kata lain dalam kredit terdapat unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika bicara tentang kredit, maka termasuk membahas unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Menurut Kasmir, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan

³ Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan ketujuh: Bumi Aksara Jakarta, 2008, hal. 87.

penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohonan kredit.

2. Kesepakatan

Dalam kredit mengandung unsur kesepakatan antara pemberian kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari pemberian kredit tersebut. Asumsinya adalah semakin lama waktu pemberian kredit semakin tinggi pula tingkat risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya adalah terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Balas jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.⁴

2.1.3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Pada tahap analisis kredit sebelum permohonan pemberian kredit disetujui maka perusahaan harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh melalui hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit yang paling mudah dan sering dilakukan adalah dengan prinsip 5C dan 7P. Kasmir menjelaskan bahwa prinsip pemberian kredit dengan menggunakan analisis 5C dan 7P.

⁴ Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Keempatbelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal, 114.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity*
Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
3. *Capital*
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
4. *Collateral*
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
5. *Condition*
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan.⁵
Menurut Kasmir penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai

berikut:

1. *Personality*
Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. *Party*
Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Perpose*
Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*
Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.91-94.

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.⁶

Kriteria-kriteria dalam semua prinsip itu perlu diperhatikan bukan saja oleh pemberi kredit, namun juga nasabah yang mengajukan kreditnya supaya dapat terpenuhi semua kriterianya. Dengan begitu, kredit yang diajukan akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk disetujui oleh lembaga keuangan.

2.1.4. Jenis-Jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam juga kebutuhan akan suatu modal atau dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan perusahaan perkeditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi Kegunaan
 - a. Kredit investasi

⁶ *Ibid*, hal. 110-111

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk dalam melakukan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang ditujukan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi Tujuan Kredit

a. Kredit produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan usaha debitur dibidang perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah merupakan jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya di atas tiga atau lima tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan sawit atau manufaktur untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik debitur selama ini.

5. Dilihat dari Sektor Usaha

a. Kredit pertanian

Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan

Kredit peternakan merupakan dalam hal ini untuk membiayai jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Kredit industri merupakan kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit pertambangan

Kredit pertambangan merupakan jenis usaha tambang yang biayanya biasanya dalam jangka panjang, misalnya tambang emas atau minyak.

e. Kredit pendidikan

Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit perumahan

Kredit perumahan merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

Kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitasnya atau penggolongan kredit yaitu performing loan dan non-performing loan yang didasarkan pada criteria

kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari hasil usahanya. Penggolongan kredit sesuai kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan bank. Pembayaran angsuran kredit mencakup pembayaran pinjaman pokok dan bunga.

Menurut Ismail dalam bukunya Akuntansi Bank, performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit nasabah yang lancar dan atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari, performing loan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok maupun bunga.

2. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender).

Non-performing loan merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. Non-performing loan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang Lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari.

2. Kredit Diragukan

Kredit Diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari.

3. Kredit Macet

Kredit Macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut lebih dari 270 hari.⁷

2.1.5. Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Tujuan Kredit

Tujuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah:

a. Bagi kreditur (Bank):

- 1) Perkreditan merupakan sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri.
- 2) Pemberian kredit merupakan pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain.
- 3) Perkreditan sebagai instrument bank dalam menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

b. Bagi debitur:

- 1) Kredit dapat berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan kinerja usaha semakin baik daripada sebelumnya.
- 2) Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
- 3) Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

c. Bagi masyarakat (Negara):

⁷ Ismail, **Akuntansi Bank**: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, Edisi Revisi, Cetakan Keempat: Kencana, Jakarta, 2014, hal. 223.

- 1) Pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di Negara ini.

- 2) Kredit dapat meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli.

Disamping itu, bagi Negara kredit dapat digunakan sebagai instrument moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi retriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter maupun perbankan.

2. Fungsi Kredit

Selain memiliki tujuan, pemberian kredit juga mempunyai fungsi yang mendukung tercapainya tujuan antara lain:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang

Debitur dapat menghasilkan barang atau jasa. Kreditur mendapat penghasilan tambahan.

- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Terdapat penambahan uang dalam setiap wilayah atau daerah melalui fasilitas kredit yang diberikan.

- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna barang dan peredaran barang

Debitur dapat mengolah kembali barang yang kurang berguna menjadi lebih efisien dan tepat guna.

d. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok.

e. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Peningkatan proyek atau usaha baru tentunya memberikan peluang bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran, yang disertai pula dengan pemberian gaji pada setiap karyawan.

f. Kredit dapat meningkatkan hubungan internasional

Penerima dan atau pemberi kredit dari negara lain dapat meningkatkan hubungan kerjasama di bidang lain, guna mencapai tujuan perdamaian dunia.

2.2. Pengendalian Intern

2.2.1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal secara ketat maka diharapkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi profit.

Pengendalian Intern menurut Mulyadi adalah:

“Sistem pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.⁸

Menurut Hery Pengendalian intern adalah

“Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersediannya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa ketentuan atau peraturan undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari berbagai kebijakan, prosedur, teknik, peralatan, fisik, dokumentasi, dan manusia.

2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi “Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah:

- 1. Menjaga kekayaan organisasi**
Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.
- 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi**
Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang

⁸ Mulyadi, *Op.Cit.*, hal.129.

⁹ Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama, Cetakan Kesatu: Pernermedia Grup, Jakarta, 2014, hal. 11.

digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan

3. Mendorong efisiensi

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.¹⁰

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

2.2.3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi “Unsur-unsur Pengendalian Internal” adalah sebagai berikut:

- 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**
- 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.**
- 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit dan organisasi.**
- 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.¹¹**

¹⁰ Mulyadi, *Op.Cit.*, hal.129.

¹¹ Mulyadi, *Ibid.*, hal.130.

Diantara ke empat unsur pengendalian tersebut, unsur mutu karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya merupakan unsur pengendalian yang paling penting. Karena apabila karyawan yang ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya maka seluruh aktivitas tidak akan berjalan lancar dan apa yang telah dilakukan tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, unsur manusia atau karyawan harus benar-benar ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya serta memiliki tugas yang telah ditetapkan agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.

2.2.4. Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian internal memiliki 5 komponen pengendalian internal yang saling berkaitan. Komponen-komponen pengendalian internal ini merupakan suatu proses pencapaian yang akan dilakukan oleh pihak organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan Amerika Serikat dikeluarkan oleh *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO). Komponen pengendalian internal *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian Internal (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau merupakan fondasi dari komponen lainnya.

Meliputi beberapa faktor meliputi:

- a. Integritas dan Etika
- b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi
- c. Dewan komisaris dan Komite audit
- d. Filosofi manajemen dan jenis operasi
- e. Struktur organisasi
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Terdiri dari identifikasi resiko. Identifikasi resiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti pengembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetisi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengolahan sistem informasi. Sedangkan analisis resiko meliputi kemungkinan terjadinya resiko dan bagaimana mengelola resiko.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap sistem informasi meliputi dua cara yaitu *General Controls*, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan *system development dan Aplication controls*, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi berfungsi untuk menjamin *completeness, accuracy, authorization and validity* dari proses transaksi.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas untuk asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi yang mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dari tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian internal untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2.3. Efektivitas

2.3.1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil. Dari pengertian tersebut maka efektivitas dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang menunjukkan keberhasilan dari suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Gibson mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.¹²

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targetnya. *Outcome* pada perusahaan pemberi kredit berupa jumlah angsuran pokok yang diterima oleh perusahaan dari pemberian kredit dan yang menjadi output pada bank berupa

¹² Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, **Organisasi**, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal 120.

pemberian kredit terhadap nasabah. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang diinginkan.

2.3.2. Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam usaha mencapai efektivitas sistem pemberian kredit, perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang diharapkan.

“Untuk itu, bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian kredit. Dalam hal ini digunakan prinsip perkreditan yang lebih dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition of economic*. Apabila prinsip tersebut telah terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai. Di samping itu perlu dilaksanakan prosedur pemberian kredit yang meliputi permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit serta pencairan kredit. Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit, suatu sistem pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan”.
13

Prioritas pemberian kredit pun menentukan keefektifan pemberian kredit. Jika kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas sistem pemberian kredit akan tercapai. Efektivitas pemberian kredit erat kaitannya dengan tujuan kredit yaitu *Profitability dan Safety*. Di samping itu, apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan dalam sistem pemberian kredit pada dasarnya merupakan unsur pengendalian internalnya.

¹³ Munawaroh, “Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri),” jurnal manajemen dan kewirausahaan, vol.13, no.1, maret 2011:76-82, <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/18246/18114>.

Kegagalan kredit juga merupakan kegagalan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas yang dicapai. Dengan demikian dapat dinyatakan apabila pengendalian intern sudah memadai akan mengingatkan pelaksanaan keputusan kredit yang baik dan akan mengurangi terjadinya kredit yang bermasalah yang disebut juga dengan kredit macet.

2.3.3. Kriteria Pengendalian Intern Pemberian Kredit Yang Efektif

Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas.

Beberapa pokok utama dalam pengendalian intern kredit menurut Tjukria P.

Tawaf (dalam skripsi Anderson Marbun) adalah:

1. **Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan taksasi agunan.**
2. **Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan; ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang; ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum); ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi; ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan; informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur; konsentrasi kredit; dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya.**
3. **Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit di koperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya.**
4. **Harus ada fungsi *review* terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan *review* serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara**

terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.¹⁴

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian intern yang efektif dalam pemberian kredit adalah:

1. Adanya pemisahan fungsi antara pejabat yang terkait
2. Adanya kebijakan atau peraturan yang ketat terhadap pemberian kredit
3. Adanya pejabat yang kompeten dibidangnya
4. Adanya review terhadap pelaksanaan kredit yang telah diberikan secara terus menerus.

¹⁴Andeson Marbun, **Skripsi: Peranan Pengendalian Intern Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Sentosa Jakarta)**, Universitas Widyatama, Bandung, 2006, hal. 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, serta teori-teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian bentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang menjadi perhatian suatu penelitian dan yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sehingga yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan yang berlokasi di Jl. Pemuda 10A Medan.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiono “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: **Objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya**”.¹⁵

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau karyawan bagian kredit PT. BTN Kantor Cabang Medan. Sehingga jumlah populasinya adalah 33 orang dengan rincian pada tabel.

Tabel 2. 1

Data Pegawai Unit Kredit PT. BTN Kantor Cabang Medan

KETERANGAN	JUMLAH
Branch Consumer Lending Head (Subsidized)	1
Branch Consumer Lending Head (Non Subsidized)	1
Sub Branch Head	10
Consumer Loan Sales	1
Consumer Loan Sales (PIC Agen Properti)	1
Consumer Loan Sales Officer (PIC Dev skala nas)	1
Consumer Loan Service	13
Consumer Loan Officer	3
Signing Officer- COD	3
JUMLAH	33

Sumber: PT. BTN Kantor Cabang Medan 2022

3.3.2. Sampel

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Edisi Baru, Alfabeta, Bandung, 2016, hal.80

Menurut Morrissan, **“sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif”**.¹⁶

Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling. Menurut Burhan Bungin:

“Teknik ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian”.¹⁷

Maka yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah karyawan atau pegawai dari setiap bidang bagian kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan sehingga sampel yang dihimpun adalah 9 orang.

3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif dapat juga didefinisikan sebagai data yang berbentuk kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau kata-kata. Data kualitatif juga berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen perusahaan dan data yang dikelola oleh perusahaan. Untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini maka dibutuhkan sejumlah data yang akan diolah menjadi informasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Morrissan, M.A., **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hal.109.

¹⁷ Bungin Burhan, **Metode Penelitian Sosial & Ekonomi**, Edisi Pertama: Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hal. 118.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam pemberian kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan. Data yang diperoleh dari perusahaan adalah deskripsi perusahaan, struktur organisasi, jenis jasa kredit yang ditawarkan serta prosedur pemberian kredit pada perusahaan tersebut.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT. BTN Kantor Cabang Medan, penulis melakukan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- b. Metode Kuesioner, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada pegawai untuk mengetahui informasi khusus yang berkaitan dengan pengendalian intern dalam pemberian kredit. Penulis akan menyebarkan

kuesioner kepada seluruh bagian kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan.

- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian dilapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pembahasan masalah sebagai dasar perbandingan praktek di lapangan.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif dan metode Champion.

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data yang dikumpulkan disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini menggambarkan bagaimana Analisis Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan.

2. Metode Analisis Champion

Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan pengendalian intern pada perusahaan adalah dengan melakukan perhitungan atas kuisisioner dengan menggunakan rumus Dean J. Champion. Penggunaan metode champion ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dikutip dari jurnal Magdalena Daos, Yohana Febiani Angi dengan judul Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Perlakuan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada UD. Angkasa Raya Kupang.

Alternatif jawaban dari kuesioner yang dibuat oleh penulis ada dua yaitu “Ya” dan “Tidak”. Setelah kuesioner yang telah disebarkan kepada bagian kredit telah dijawab semua, maka hasil jawaban kuesioner tersebut akan dihitung dengan menggunakan skala penilaian berdasarkan rumusan Champion.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Ya}}{\text{Jumlah Jawaban kuisisioner}} \times 100\%$$

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **0,00 – 0,25 = Pengendalian intern dalam pemberian kredit tidak efektif**
2. **0,26 – 0,50 = Pengendalian intern dalam pemberian kredit kurang efektif**
3. **0,51 – 0,75 = Pengendalian intern dalam pemberian kredit cukup efektif**
4. **0,76 – 1,00 = Pengendalian intern dalam pemberian kredit sangat efektif.**¹⁸

¹⁸ Magdalena Daos, Yohana Febiani Angi, **Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Perlakuan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada UD. Angkasa Raya Kupang**, Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Vol.7, No.1, 2019 Hal. 8, <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JAK/article/view/1298/1028>.

